

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Signalling Theory (Teori Sinyal) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Spence (1973) mengatakan dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Selain itu, Teori ini diperkenalkan juga oleh Arkelof (1970), yang menurutnya informasi memiliki nilai dan para pihak yang terkait memiliki berbagai tingkat informasi. Konsep dasar teori legitimasi sejalan dengan teori persinyalan. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama perusahaan ialah untuk memberi sinyal kepada pihak eksternal mengenai niat baik perusahaan. Niat baik ini biasanya ditunjukkan dengan mengungkapkan lebih banyak informasi terutama yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan perusahaan (Durlista, 2023). Teori ini menguraikan mengapa perusahaan diwajibkan untuk mengkomunikasikan informasi tentang laporan keuangan mereka kepada pihak eksternal (Durlista, 2023). Sinyal dapat diinterpretasikan sebagai tanda yang diberikan oleh perusahaan kepada investor. Oleh sebab itu, sinyal yang diterbitkan karena perusahaan harus memiliki kekuatan informasi yang mampu mengubah pendapat orang asing tentang valuasi perusahaan (Martha, 2023). Menurut Jogiyanto (2013), *signalling theory* menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. (Hartono, 2013), menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Menurut Wolk dkk (2001) berpendapat bahwa teori sinyal menjelaskan motivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada pasar modal. Teori ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan yang memerlukan informasi tersebut. Hendriksen (1987) menjelaskan bahwa informasi asimetris adalah situasi di mana salah satu pihak dalam kesepakatan tidak mengakses informasi yang setara dengan pihak lainnya. Salah satu pendekatan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi ini adalah perusahaan dapat memberikan sinyal, yang bisa berupa data tentang

produksi, keuntungan, faktor-faktor lingkungan, penjualan, dan preferensi konsumen (En, 2002). Teori sinyal menekankan bahwa perusahaan menggunakan informasi untuk memberikan "sinyal" kepada pasar tentang kualitas internal mereka. ESG *disclosure* merupakan sinyal bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. (Dewanti, 2024)

2.2 Environmental, Social and Governance (ESG)

ESG merupakan singkatan dari *Environmental, Social, and Governance*, yang berfungsi sebagai pedoman yang mesti diterapkan oleh perusahaan yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola. Konsep ini dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menilai pengaruh sosial dan keberlanjutan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang mengikuti kriteria ini akan menggabungkan ketiga aspek tersebut dalam operasi mereka serta dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi. Pada dasarnya, konsep ini muncul akibat meningkatnya kesadaran para investor tentang pentingnya model bisnis yang berkelanjutan. Kesadaran ini mendorong perusahaan untuk menerima konsep tersebut sebagai panduan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis untuk jangka panjang. ESG memiliki peran yang signifikan dalam dunia bisnis dan investasi karena memfasilitasi perusahaan dalam mengelola risiko, membangun citra yang baik, serta menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Memahami lebih dalam mengenai konsep ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dan investor dapat berkontribusi pada upaya menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. (Articel IEC, 2023)

ESG adalah metode untuk menilai, mengkomunikasikan, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan (Almeyda, 2019). Salah satu tantangan utama dalam memahami investasi ESG adalah kebingungan atas makna konsep dan sumber motivasi investor untuk mengadopsi pendekatan investasi ini (Starks, 2021). Terminologi ESG ini sering kali dikaitkan dengan program keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yakni dalam kaitannya dengan pendanaan, investasi, maupun aspek-aspek lainnya yang dapat dijadikan sebagai bentuk

pelaporan kepada publik (Sofia, 2024). ESG adalah kerangka kerja yang membantu para pemangku kepentingan memahami bagaimana suatu organisasi mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (terkadang disebut faktor ESG) (Peterdy, 2024).

2.3 High Profile

Menurut (Hackston & J. Milne, 1996), perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* adalah perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi terhadap lingkungan sekitarnya, resiko politik yang juga cukup tinggi, atau persaingan yang cukup ketat dilingkungan bisnisnya. Perusahaan yang tergolong dalam industri *high-profile* cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak karena dampak yang diberikan dari aktivitas perusahaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan lingkungan sekitar (Wijaya, 2016). Perusahaan-perusahaan *high profile*, pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal bagi masyarakat. Perusahaan *high profile* juga lebih sensitif terhadap keinginan konsumen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap produknya. Adapun perusahaan yang tergolong dalam perusahaan *high profile* pada umumnya mempunyai sifat memiliki Jumlah tenaga kerja yang besar, dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah cair dan polusi udara. Contoh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri *high profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (Istrik), engineering, kesehatan serta transportasi dan pariwisata (Zuhroh, 2003).

Pada penelitian ini, perusahaan yang dikategorikan sebagai *high profile* antara lain perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. pertambangan batu bara, industri minyak dan gas bumi (migas), pertambangan, infrastruktur, dan minyak & gas bumi. pelayaran angkutan laut, terutama pengangkutan LNG, minyak, dan petrokimia. logistik dan pelayaran, khususnya dalam pengangkutan dan

pemindahmuatan batubara dan mineral. alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. (Wijaya, 2016)

2.4 Low Profile

Perusahaan *low profile* adalah perusahaan yang tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat jika operasi yang mereka lakukan mengalami kesalahan pada aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya (Mahaputra, 2023). Tipe industri *low-profile* merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat *consumer visibility*, tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas yang digerakannya, meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya (Daud, 2014). Perusahaan *low-profile* antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok peralatan medis, properti, perusahaan ritel, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga (Permatasari, 2014).

Pada penelitian ini, perusahaan yang dikategorikan sebagai *low profile* antara lain perusahaan pertambangan batu bara, energi terbarukan, dan jasa terkait. pertambangan batu bara metalurgi dan pengolahan mineral. perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), bahan kimia dasar, jasa logistik, dan juga memiliki kegiatan di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara. pertambangan batubara, kontraktor pertambangan, terutama jasa pertambangan batu bara dan mineral. pertambangan mineral dan energi. (Mahaputra, 2023)

2.5 Pengungkapan ESG (ESG Disclosure)

Pengungkapan ESG merujuk pada cara perusahaan mengungkapkan informasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. ESG merupakan sebuah kriteria bagi praktik investasi yang memadukan dan melaksanakan kebijakan perusahaan dengan cara yang sejalan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Peterdy, 2024). Topik yang diangkat dalam kriteria lingkungan mencakup penggunaan energi oleh perusahaan, pengelolaan limbah, pencemaran, perlindungan sumber daya alam, dan dampak terhadap flora dan fauna. Kriteria sosial mencerminkan interaksi perusahaan dengan pihak-pihak luar seperti komunitas, pemasok, kelompok masyarakat, pembeli, dan lembaga lain

yang terhubung dengan perusahaan. Standar tata kelola membahas bagaimana suatu perusahaan dikelola dengan baik dan berkelanjutan (Sofia, 2024). Pengungkapan ESG merupakan suatu bentuk pengukuran baru untuk transparansi sukarela perusahaan, yang biasanya menjadi bagian dari laporan CSR, laporan keberlanjutan, atau laporan terintegrasi dalam laporan tahunan yang terpisah. Disini, diharapkan perusahaan tidak hanya memprioritaskan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.(Utomo, 2024)

2.5.1 Aspek Lingkungan (*Environmental*)

Aspek lingkungan (*Environmental*) dalam penerapan ESG di Indonesia dan dunia mencakup berbagai isu seperti perubahan iklim, konservasi sumber daya, dan pengendalian polusi. Isu lingkungan global seperti perubahan iklim, misalnya, telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Peningkatan suhu global, pencairan es di kutub, dan cuaca ekstrem adalah dampak nyata dari perubahan iklim. Manajemen risiko isu lingkungan terkini dan isu lingkungan lokal menjadi sangat penting dalam hal ini, karena perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan tajam terkait pengendalian risiko mengelola risiko yang terkait dengan dampak lingkungan atau isu pencemaran lingkungan dari operasi mereka. Perusahaan memiliki peran penting dalam mitigasi dampak ekologis. Mereka dapat berkontribusi melalui upaya konservasi sumber daya alam dan efisiensi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai upaya *net zero emission*, dan pengelolaan limbah yang lebih baik (GENERALI, 2024). Banyak faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) diantaranya pandangan bahwa suatu perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang baik akan menyajikan tingkat pengungkapan lingkungan yang tinggi untuk menjaga reputasi perusahaan. Adanya alokasi biaya lingkungan (*environmental cost*) yang jelas menunjukkan adanya konsistensi tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan (Putra, 2021).

Aspek lingkungan berkaitan dengan efek perusahaan terhadap alam selama mereka beroperasi. Hal ini mencakup banyak aspek seperti pemanfaatan energi yang bersih,

pengelolaan limbah, upaya untuk menekan polusi, serta praktik untuk melestarikan sumber daya alam (Perdana, 2022). Memperhatikan faktor lingkungan dalam manajemen risiko perusahaan dapat membantu meminimalisasi kemungkinan dampak buruk bagi bisnis. Ini juga menambah nilai dalam evaluasi operasional perusahaan dengan memperhitungkan komitmen mereka terhadap praktik berkelanjutan (Sofia, 2024). Kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan memberikan efek positif bagi perusahaan karena mendukung kelangsungan operasional bisnis dalam jangka panjang yang didukung oleh kondisi lingkungan yang baik. (Articel IEC, 2023)

2.5.2 Aspek Sosial (*Social*)

Dalam pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) mencakup aktivitas dan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk karyawan, komunitas lokal, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengungkapan aspek sosial berfokus pada bagaimana perusahaan memperlakukan orang, melindungi hak asasi manusia, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial (Perdana, 2022). Aspek sosial dalam ESG menekankan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk menghargai hak asasi manusia, menjaga kesejahteraan para pekerja, dan memberikan sumbangan positif bagi komunitas. Hal tersebut termasuk memastikan kondisi kerja yang adil, mendukung komunitas lokal, dan mempromosikan keragaman dan inklusi (Permana, 2023). Aspek Sosial berfokus pada interaksi perusahaan dengan pihak luar, termasuk masyarakat, pemasok, pelanggan, media, dan organisasi lain yang berhubungan dengan perusahaan. Ini dapat berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Reputasi perusahaan bisa terpengaruh oleh cara perusahaan menanggapi masalah sosial. Misalnya, perusahaan diharuskan untuk secara aktif menangani isu, hak-hak, dan tantangan yang dihadapi oleh staf dan buruh. Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dan memberikan dampak positif terhadap isu sosial menjadi elemen penting dalam penilaian standar ini. (Articel IEC, 2023).

2.5.3 Aspek Tata Kelola (*Governance*)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor (AirNav, 2018). Pengungkapan tata kelola bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap standar etika, regulasi, serta kepentingan pemangku kepentingan. Faktor tata kelola berkaitan dengan struktur perusahaan, proses pengambilan keputusan, dan bagaimana perusahaan menjalankan operasinya secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Aspek-aspek tata kelola meliputi independensi dewan direksi, adanya mekanisme audit dan pengawasan yang kuat, kebijakan anti-korupsi, dan perlindungan hak pemegang saham (Harahap, 2023). Aspek penting tata kelola yang terkadang terlupakan adalah bahwa sebagian besar perusahaan pada dasarnya sudah *familier* dengan tata kelola, yang merupakan manfaat utama dalam penerapan kerangka ESG yang lebih luas. Meskipun pelaporan lingkungan dan hubungan sosial mungkin merupakan wilayah baru bagi tim kepatuhan, isu tata kelola terkait erat dengan fungsi kepatuhan yang ada seperti urusan hukum, audit internal, dan sumber daya manusia (McCarthy, 2024). Aspek tata kelola ini lebih mengutamakan interaksi luar dan menyoroti cara perusahaan diorganisir dan diadministrasikan secara internal. Kriteria mengenai tata kelola perusahaan meliputi berbagai elemen, seperti kebijakan perusahaan, norma perusahaan, budaya organisasi, tingkat keterbukaan, prosedur audit, dan kepatuhan. Elemen-elemen ini dapat meningkatkan nilai perusahaan karena pengelolaan yang baik dan bersih menambah kepercayaan dari pihak investor. Misalnya, pengelolaan keuangan yang terbuka, sah, dan beretika selalu menjadi perhatian utama bagi para investor. (Articel IEC, 2023)

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Aida Yulia dan Afrianti, 2014)	Analisis Perbedaan <i>Pengungkapan Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan <i>High Profile</i> dan <i>Low Profile</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara perusahaan <i>High Profile</i> dan <i>Low Profile</i>
2.	(Megi Oktriani Herman dan Randy Heriyanto, 2017)	Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Antara Sebelum dan Sesudah Berpartisipasi Dalam Indonesia <i>Sustainability Reporting Awards</i> (ISRA)	<p>1. Pengujian yang dilakukan untuk hipotesis H1, H2, H3 dengan variabel kinerja keuangan perusahaan Rasio Profitabilitas yaitu ROA, ROE, dan NPM membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan sebelum dan sesudah berpartisipasi dalam ISRA.</p> <p>2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana tentang <i>sustainability reporting</i> masih belum direspon oleh masyarakat khususnya investor di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih ada point-point lain selain terdaftarnya perusahaan menjadi partisipan ISRA yang menjadi perhatian</p>

			investor untuk berinvestasi di Perusahaan.
3.	(Roy Virgo Paloga dan Dedi Putra, 2019)	Perbedaan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Pemilihan Auditor <i>Eksternal</i>	<p>a) Hasil pengujian variabel persentase kepemilikan saham institusional temukan terdapat perbedaan secara signifikan antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan</p> <p>b) Persentase kepemilikan saham manajerial terdapat perbedaan secara tidak signifikan.</p> <p>c) Jumlah dewan komisaris terdapat perbedaan secara tidak signifikan</p> <p>d) Jumlah komite audit terdapat perbedaan yang signifikan</p> <p>e) Jumlah dewan direksi terdapat perbedaan secara tidak signifikan</p> <p>f) Pemilihan auditor eksternal terdapat perbedaan tidak secara signifikan.</p>
4.	(Erna Kurniya Wati dan Endang Kartini Panggiarti, 2021)	Uji Beda Rata-Rata Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Mandiri	Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Syariah Mandiri pada waktu sebelum dan saat pandemi Covid-19 terdapat beda rata-rata. Karena setelah dilakukan uji beda rata-rata memakai uji Paired t-test

			<p>pada penyaluran dana CSR, penyaluran dana CSR program Mitra Umat, penyaluran dana CSR program Didik Umat, dan penyaluran dana CSR program Simpati Umat menunjukkan bahwa nilai t yang dihasilkan bernilai negatif. Sehingga dapat dilihat hasil dari keempat uji tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyaluran biaya <i>Corporate Sosial Responsibility</i> yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada waktu sebelum dan saat pandemi Covid-19.</p>
5.	(Rima Melati dan Eddy Suranta, 2024)	<p>Perbedaan Kinerja Keuangan dan <i>Leverage</i> Antara Perusahaan yang Mengalami <i>Financial Distress</i> dengan Perusahaan yang tidak Mengalami <i>Financial Distress</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan skor ESG antara perusahaan yang berada pada kondisi krisis keuangan dengan perusahaan yang tidak berada pada kondisi krisis keuangan, 2. Rasio ROA berbeda antara kedua jenis perusahaan, 3. Rasio ROE berbeda antara perusahaan yang berada pada kondisi krisis keuangan dengan perusahaan yang tidak berada pada kondisi krisis keuangan,

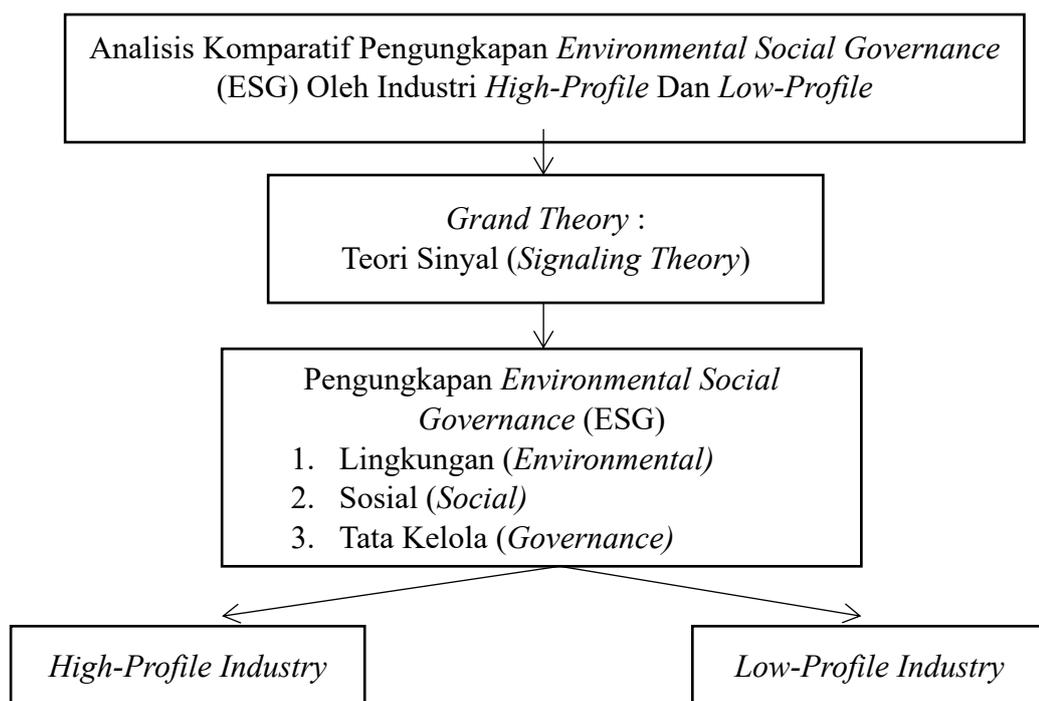
			<p>4. <i>Leverage</i> yang diproksikan dengan DAR memiliki perbedaan antara perusahaan yang berada pada kondisi krisis keuangan dengan perusahaan yang tidak berada pada kondisi krisis keuangan,</p> <p>5. BIG4 berbeda antara perusahaan yang berada pada kondisi krisis keuangan dengan perusahaan yang tidak berada pada kondisi krisis keuangan.</p>
--	--	--	---

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian

Model kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1. Pengungkapan *Environmental*

Pengungkapan informasi tentang *Environmental* adalah pembicaraan yang terjadi antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan akan berupaya untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan usaha mereka agar dapat mengubah pandangan dan harapan dari para pemangku kepentingan (Fadilah, 2024). Menurut (Wibisono, 2011), pengungkapan tentang *Environmental* adalah bentuk pengungkapan dalam bentuk angka yang terdiri dari informasi finansial maupun non-finansial yang wajib disampaikan secara berkala oleh setiap perusahaan di dalam laporan tahunan serta laporan sukarela yang diterbitkan hanya pada tahun tertentu saja (Sayuti, 2020). Faktor lingkungan mencakup dampak perusahaan terhadap lingkungan alam sekitarnya. Hal ini melibatkan penilaian mengenai bagaimana perusahaan mengelola sumber daya alam, upaya mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan. (Harahap, 2023)

Bedasarkan penelitian diatas, maka hipotesis adalah:

H1 : Terdapat perbedaan pengungkapan *environmental* untuk industri *high-profile* dan *low-profile* pada perusahaan sektor *energy*.

2.6.2 Pengungkapan *Social*

Di zaman media sosial saat ini, konsumen memiliki kemampuan untuk dengan cepat menyebarkan informasi dan berinteraksi, yang berarti mereka dapat mengancam perusahaan karena tindakan yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, menciptakan citra perusahaan yang baik menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan (Almeyda, 2019). Faktor sosial mengacu pada cara perusahaan berinteraksi dengan masyarakat, karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu sosial termasuk kesejahteraan karyawan, hak asasi manusia, keragaman, hubungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya (Harahap, 2023). Perusahaan *low profile* tidak begitu diperhitungkan akan pertanggungjawaban sosialnya yang dapat diartikan bahwa perusahaan *low profile* tidak dapat

menjalankan melebihi dari perusahaan *high profile*. Perusahaan *high profile* dituntut untuk tidak lalai akan pertanggungjawabannya terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasi yang dijalankan pada lingkungan sekitar entitas bisnis sehingga hasil teori tersebut mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan (Afrianti, 2014).

Bedasarkan penelitian diatas, maka hipotesis adalah:

H2 : Terdapat perbedaan pengungkapan *social* untuk industri *high-profile* dan *low-profile* pada perusahaan sektor *energy*.

2.6.3 Pengungkapan *Governance*

Pengungkapan tentang *governance* menciptakan dampak yang menguntungkan karena praktik Pengungkapan *governance* perusahaan telah lama diimplementasikan di Indonesia, serta pentingnya Pengungkapan *governance* meningkat di mata para pemangku kepentingan (Zuhroh, 2003). Pengungkapan yang baik terkait dengan *governance* perusahaan sangat penting untuk menghadapi berbagai risiko, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun reputasi perusahaan. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi para pemangku kepentingan, meningkatkan tingkat kepatuhan, serta menjaga nilai-nilai etika yang diakui secara luas (Zuhroh, 2003). Faktor tata kelola berkaitan dengan struktur perusahaan, proses pengambilan keputusan, dan bagaimana perusahaan menjalankan operasinya secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Aspek-aspek tata kelola meliputi independensi dewan direksi, adanya mekanisme audit dan pengawasan yang kuat, kebijakan anti-korupsi, dan perlindungan hak pemegang saham (Harahap, 2023)

Bedasarkan penelitian diatas, maka hipotesis adalah:

H3 : Terdapat perbedaan pengungkapan *Governance* untuk industri *high-profile* dan *low-profile* pada perusahaan sektor *energy*.